

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA

Rizki Akbar, Wardoyo Bayu Anggoro, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail: rizkiakbarmilan@gmail.com bayuanggoroanggoro24@gmail.com
sititiaramaulia@umja.ac.id

Abstract

Citizenship education (civic education) is an adaptation of cross-disciplinary social sciences, citizenship science, is the basis of knowledge about the basis of law, religion and good values, Citizenship Education as the basis for value and moral education means that citizenship education contains value education, so that Citizens can understand the learning process that develops the knowledge, attitudes and skills of citizens in their relationship with the state, nation and society. Citizenship education contains education on legal values that are born in moral awareness, so that legal values are considered good by society. Citizenship Education as values and moral education as well as legal education will lead citizens to become good and knowledgeable citizens which is marked by the realization of citizens who have civic knowledge, skills and have civic responsibilities.

Keywords: *Citizenship, Values and Morals, National Character*

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) adalah adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan merupakan dasaran ilmu pengetahuan tentang dasar hukum, agama dan nilai-nilai kebaikan, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan pendidikan nilai dan moral berarti pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai agar warganegara dapat memahami proses pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara dalam hubungannya dengan negara, bangsa, dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan nilai hukum yang lahir dalam kesadaran moral, sehingga nilai-nilai hukum yang di anggap baik oleh masyarakat, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral juga pendidikan hukum akan mengantarkan warganegara menjadi warganegara yang baik dan berilmu yang di tandai dengan terwujudnya warganegara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan memiliki keterampilan, dan memiliki tanggung jawab kewarganegaraan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Nilai dan Moral, Karakter Bangsa

Pendahuluan

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan betapa pendidikan formal secara tradisional telah disiapkan melalui salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional melalui disiplin ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya tentang pendidikan kewarganegaraan, sebagai tindak

lanjut dari Dekrit Presiden 1959 untuk kembali kepada UUD 1945, diantaranya dengan instruksi pembaharuan buku-buku di perguruan tinggi

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, dan meliputi berbagai komponen yang berkaitan erat satu sama lain. Oleh sebab itu, apabila pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan, teratur, maka berbagai faktor yang terlibat dalam pendidikan harus dipahami terlebih dahulu. Berbagai komponen dalam sistem pendidikan, baik secara mikro maupun dalam kajian makro perlu dikenali secara mendalam sehingga komponen-komponen tersebut dapat difungsikan dan dikembangkan guna mengoptimalkan garapan pendidikan tersebut ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan (Dinn Wahyudi dkk, 2006)

Pendidikan nilai merupakan salah satu komponen dalam pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar memiliki akhlak mulai. Saat ini pendidikan nilai di Indonesia dinilai tidak masalah dengan peran pendidikan dalam mecerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian peserta didik agar berakhlak mulia. Oleh karena itu peran pendidikan nilai dipandang sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Pendidikan nilai sudah tentu penting untuk semua tingkat pendidikan, yakni dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pendidikan kewargaan negara menurut kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila, Bahan pembelajarannya digunakan sampai dengan ditetapkannya pendidikan kewargaan negara dalam kurikulum 1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai bidang studi untuk pendidikan kewargaan negara yang tujuan adalah membentuk warganegara Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, Selama masa orde baru, kurikulum telah berubah beberapa kali, yang berakibat berubahnya pula kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diawali dengan kurikulum 1962 ke kurikulum 1968, kemudian menjadi kurikulum 1975, dan selanjutnya kurikulum tahun 1984 sebagai penyempurnaan terhadap kurikulum 1975, terakhir kurikulum tahun 1994 sebagai kelanjutan kurikulum 1984. Kurikulum tahun 1994 ini kemudian dilengkapi sehingga lahir kemudian kurikulum 1994 Edisi Revisi (Kurikulum Suplemen 1994).

Perubahan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) yang bernama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga terjadi dalam era orde baru. Perubahan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) paling tidak didasari oleh dua pertimbangan. Pertama, dengan adanya kata moral dalam PMP memberi beban psikologis yang berat bagi guru PMP karena dalam kenyataannya selalu menjadi "kambing hitam" bila ada perilaku siswa yang bertentangan dengan kaidah dan dasar-dasar moral. Kedua, perubahan dari PMP menjadi PPKn juga didasari oleh aspek legal yaitu pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bunyinya adalah: Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

Metode Penelitian

Penyusunan dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Sugiyono (2018: 291) menyatakan bahwa studi kepustakaan (library research) berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi berupa

buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan beserta dokumen-dokumen yang relevan. Secara sederhana, studi kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan dari perpustakaan tanpa harus turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan (Zed. 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian tentang pendidikan kewarganegaraan (civic education) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan civics atau ilmu kewargaan negara di Amerika Serikat sebagai negara asal pelajaran civics dan civic education. Membahas civic education tidak dapat tanpa membahas pula tentang civics yang sering dikaitkan dengan government. Dalam berbagai literatur studi sosial dapat dijumpai istilah civic, civics, dan juga citizenship/ civic education.

Dalam konferensi menteri pendidikan negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad XXI harus berperan aktif dalam hal: (1) Mempersiapkan pribadi warganegara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. (2) Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. (3) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan (Ujang Charda S, 2019: 2) Untuk memahami dan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kita harus menganalisis terlebih dahulu dua masalah, yakni (1) arti pendidikan kewarganegaraan menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan fungsi Jurusan PPKn dalam mengembangkan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

Menurut UU No. 2/1989 pasal 39 pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan umum disamping pendidikan Agama dan pendidikan Pancasila untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam penjelasan pasal 39 UU No.2/1989 dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 34/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dengan kompetensi menjadi ilmuwan dan Profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Ujang Charda S, 2019), Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS yang menekankan nilai-nilai untuk menumbuhkan warganegara yang baik dan patriotik dalam bela negara, maka pengertian pendidikan kewarganegaraan dapat

dirumuskan sebagai berikut: Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi, adaptasi dari lintas disiplin ilmu ilmu sosial,

ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan Secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan berfikir aktif warga negara generasi muda dalam menginternalisasi nilai-nilai warga negara yang baik, dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (civic affairs). Dalam kepustakaan asing pendidikan kewarganegaraan sering disebut Civic Educational, yang salah satu batasannya ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai dan Moral

Dalam literatur pendidikan, bahwa pendidikan nilai lebih banyak dibahas sebagai pendidikan moral, hal ini terjadi karena tujuan pendidikan moral itu sendiri ditekankan pada metode pertimbangan moral dan untuk membantu anak-anak mengenai apa yang menjadi dasar untuk menerima suatu nilai. Nilai merupakan salah satu objek pendidikan moral,

Nilai adalah segala sesuatu yang berharga. Secara umum nilai dibedakan menjadi nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal adalah nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai aktual adalah nilai yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari. Disamping itu nilai dapat pula dibedakan menjadi nilai logika, estetika, etika, agama/religius, hukum. Semua nilai-nilai ini menjadi acuan atau sistem keyakinan diri maupun kehidupan (Kosasi Djahiri. 1996). Nilai ada yang bersifat dasar yaitu nilai yang tidak berubah dan berlaku secara universal disamping nilai yang bersifat subjektif, yaitu nilai yang bergantung pada budaya, waktu, dan tempat (relativitas nilai), sehingga nilai dapat dibagi menjadi nilai objektif yang bersifat intrinsik dan nilai subjektif yang bersifat ekstrinsik.

Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, moral sendiri berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat-istiadat. moral memiliki makna sebagai suatu pernyataan dari gagasan, ide atau bahkan pikiran yang berhubungan dengan dorongan dan menggelegak pada diri seorang individu dalam bekerja serta berfungsi sebagai suatu aspek yang dapat membangkitkan perilaku seseorang. Dan juga ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan merupakan upaya strategis dalam pembentukan sistem nilai yang ada dalam diri seseorang, yang kaitannya dengan perwujudan harkat dan martabat sebagai manusia sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang melingkupinya. Pendidikan senantiasa mengarahkan upaya dalam peningkatan kesadaran, harkat dan martabat seseorang baik secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat suatu bangsa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Sejalan dengan hal tersebut, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, meninggalkan jatidiri bangsa Indonesia dengan hidup apatis (Rahmatiani, 2017).

PKn secara konseptual merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan pribadi warga negara paripurna Secara psikologis ranah pembinaan seyogyanya dikembangkan melalui pembelajaran PKn, seperti yang digambarkan oleh Winataputra (2014). penyelenggaraan PKn dimaksudkan untuk mengembangkan daya nalar dan daya kritis siswa, sehingga diarahkan membangun karakter bangsa yang merupakan bagian dari upaya pengembangan warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa, pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (good citizen) dan smart citizen (warga negara yang cerdas) guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan. Pendidikan karakter dalam pembelajaran kewarganegaraan merupakan solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai disiplin ilmu yang merupakan ladang unggulan dalam pembinaan karakter peserta didik. Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran kewarganegaraan, dan muatan materinya memiliki nilai karakter yang kaya, yang selanjutnya akan membantu mengintegrasikan konsep pendidikan karakter. Pengembangan karakter siswa tidak hanya dapat dikembangkan melalui muatan materi kewarganegaraan, tetapi juga secara tidak langsung melalui berbagai tahapan kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan karakter siswa juga dapat didukung dengan penggunaan metode, media dan sumber belajar.

Saran

Pendidikan karakter perlu dipersiapkan dalam pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan harus disiapkan materi, metode, media, sumber belajar, tahapan kegiatan pembelajaran dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Komponen komponen pembelajaran secara tidak langsung dapat membantu kemajuan siswa di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aditia, E., & Noor, F. (2017). Strategi Membentuk Karakter Semangat Kebangsaan Anggota Ambalan Kyai Mojo Dan Nyi Ageng Serang. *Jurnal. Refleksi dukatika*, 7(2), 140-144.
- Achmad Kosasih Djahiri. 1985. Strategi Pengajaran Afektif-Nilai- Moral VCT dan Games dalam VCT.

- A.Ubaedillah. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pebriyenni, P. (2017). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkuat Karakter Bangsa. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 12(2), 16-34.
- Nur, R. A. P., Truvadi, L. A., Agustina, R. T., & Salam, I. F. B. (2023). Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia: Tinjauan dan Implikasi. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 501-510.
- Soenarjati M & Cholisin. 1989. Konsep Dasar Pendidikan Moral Pancasila. Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Suparlan Al Hakim, dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia, Malang: Madani.
- Ujang Charda S. 2019. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno. 2018. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksar
- Winarno Budi, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta Med Pres Anggota IKAPI